

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

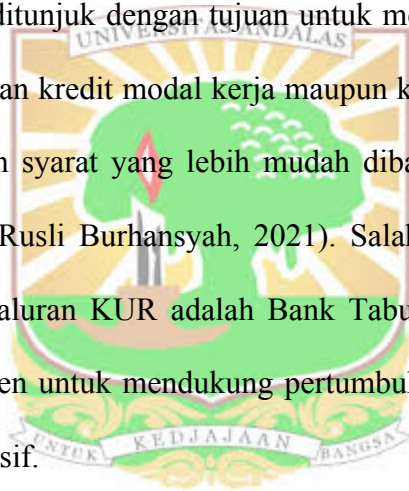
### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi suatu negara tidak dapat terlepas dari peran sektor Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi sumber utama penyediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia dan mampu menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional (Ulfa Roudhotun Nurul Janah, 2024). Hal ini menunjukkan betapa vitalnya sektor UMKM dalam menggerakkan ekonomi rakyat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Namun, meski UMKM memiliki peran strategis, salah satu tantangan utama yang dihadapi sektor ini adalah terbatasnya akses terhadap modal usaha. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), lebih dari 70% pelaku UMKM menyatakan bahwa kesulitan utama dalam pengembangan usaha adalah akses terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Hasang & Nur, 2020). Banyak UMKM yang terkendala dalam memenuhi persyaratan administratif dan jaminan yang diminta oleh

lembaga keuangan, yang pada akhirnya membuat mereka terpaksa mencari alternatif pembiayaan dari sumber-sumber informal yang cenderung memiliki bunga lebih tinggi dan risiko yang lebih besar.

Untuk menjawab permasalahan ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, salah satunya adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan skema pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah melalui bank-bank yang ditunjuk dengan tujuan untuk memfasilitasi pelaku UMKM dalam mendapatkan kredit modal kerja maupun kredit investasi dengan suku bunga rendah dan syarat yang lebih mudah dibandingkan kredit komersial pada umumnya (Rusli Burhansyah, 2021). Salah satu bank yang berperan aktif dalam penyaluran KUR adalah Bank Tabungan Negara (BTN), yang memiliki komitmen untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM melalui pembiayaan inklusif.



Bank Tabungan Negara (BTN) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sejarah panjang dalam memberikan layanan perbankan bagi masyarakat Indonesia. Didirikan pada tahun 1897, BTN awalnya berfokus pada penyediaan layanan tabungan untuk publik. Seiring dengan perkembangan zaman, BTN mulai memperluas cakupannya, termasuk pembiayaan perumahan melalui KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang menjadi andalan bank ini. BTN telah memantapkan posisinya sebagai

bank yang memiliki spesialis dalam pembiayaan sektor perumahan, dengan portofolio yang dominan di bidang KPR baik untuk segmen menengah maupun segmen subsidi.

Meskipun dikenal sebagai bank yang unggul di sektor pembiayaan perumahan, BTN juga memiliki peran penting dalam mendukung sektor UMKM di Indonesia. Dengan meningkatnya kebutuhan akan akses pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku UMKM, BTN berupaya untuk memperluas layanannya melalui berbagai program pemerintah, termasuk KUR. Dalam program KUR, BTN bertindak sebagai salah satu bank penyalur utama yang ditunjuk pemerintah dengan misi memberikan akses kredit yang lebih luas kepada pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BTN dirancang untuk mempermudah akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. BTN memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, memungkinkan penyaluran KUR dapat menjangkau pelaku usaha hingga ke daerah terpencil. Selain itu, BTN juga menerapkan sistem teknologi yang mendukung efisiensi dalam proses pengajuan dan pencairan KUR, sehingga proses administrasi dapat berjalan dengan lebih cepat dan transparan. Prosedur penyaluran KUR di BTN melibatkan beberapa tahapan, mulai dari proses

pengajuan, analisis kelayakan usaha, penentuan jaminan, hingga pencairan kredit. Meski demikian dalam implementasinya, terdapat berbagai kendala yang muncul baik dari sisi bank maupun nasabah, seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap persyaratan KUR, ketidaksesuaian antara profil usaha dengan kebijakan kredit, serta munculnya kredit bermasalah (non-performing loan) akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran (Arif Wijaksono, 2011).

Kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) merupakan tantangan tersendiri dalam program KUR. Jika tidak dikelola dengan baik, NPL dapat berdampak buruk pada kesehatan keuangan bank dan merusak kepercayaan masyarakat program ini (Maya Fredawati, 2009). Oleh karena itu, Bank BTN telah menetapkan mekanisme penanganan kredit bermasalah yang meliputi upaya preventif melalui pengawasan ketat dan edukasi kepada nasabah serta upaya hukum terhadap debitur yang gagal memenuhi kewajibannya. Upaya hukum tersebut dapat berupa penyitaan jaminan atau langkah-langkah litigasi yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Tabungan Negara (BTN), mulai dari tahap awal pengajuan hingga proses pencairan kredit. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji secara

komprehensif mengenai ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam program KUR di BTN, serta menganalisis bagaimana BTN menangani kredit bermasalah dalam program KUR, termasuk upaya hukum yang ditempuh dalam penyelesaian kredit bermasalah. Dengan memahami prosedur dan kebijakan KUR secara menyeluruh, diharapkan tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi penyaluran kredit yang lebih efektif, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan dimasa yang akan datang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul tugas akhir ini, maka masalah yang penulis rumuskan, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Tabungan Negara (BTN)?
2. Jelaskan hambatan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Tabungan Negara?
3. Apa sajakah usaha dalam mengatasi hambatan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Tabungan Negara?

## **1.3 Tujuan Magang**

Adapun tujuan dilakukan magang ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Tabungan Negara (BTN).

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Tabungan Negara
3. Untuk mengetahui usaha dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Tabungan Negara (BTN)

#### **1.4 Manfaat Magang**

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis, instansi, universitas adalah sebagai berikut :

##### **a. Bagi Penulis**

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).
2. Mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama kuliah pada program studi Diploma III Akuntansi.
3. Meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi, memperoleh keterampilan dan kreatifitas dalam lingkungan kerja.
4. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

##### **b. Bagi Instansi**

1. Dapat membina kerja sama antara lembaga pendidikan dengan perbankan.
2. Dengan adanya mahasiswa magang dapat membantu aktivitas kerja pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN).
3. Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa

magang sebagai bentuk nyata yang diberikan perusahaan.

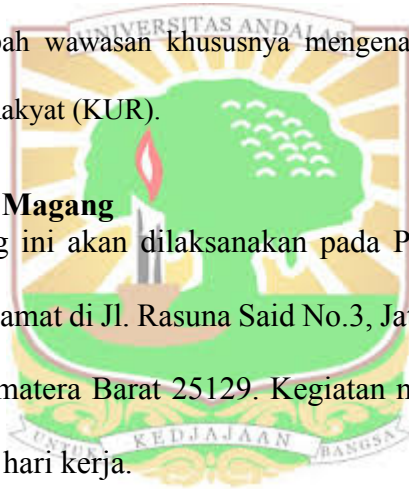
4. Menunjang dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

**c. Bagi Universitas**

1. Untuk menjalin kerjasama serta hubungan yang baik antara Universitas Andalas dengan PT. Bank Tabungan Negara (BTN).
2. Untuk meningkatkan kualitas lulusan terbaik di Universitas Andalas.
3. Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa dan bahan bacaan untuk menambah wawasan khususnya mengenai prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

**1.4 Tempat dan Waktu Magang**

Kegiatan magang ini akan dilaksanakan pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) yang beralamat di Jl. Rasuna Said No.3, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat 25129. Kegiatan magang berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja.



**1.5 Sistematika Penulisan**

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengumpulan data, metode analisa data, dan sistematika penyusunan laporan.

**BAB II : Landasan Teori**

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian bank, pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR), jenis-jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR), suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), kriteria calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta teori-teori yang relevan.

### **BAB III : Gambaran Umum**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum PT. Bank Tabungan Negara (BTN), yaitu Sejarah, Visi dan Misi, Nilai-nilai budaya PT. Bank Tabungan Negara (BTN), Logo PT. Bank Tabungan Negara (BTN), dan Produk Kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN).

### **BAB IV : Pembahasan**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran hasil atau data yang didapat penulis selama magang.

### **BAB V : Penutup**

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari laporan hasil penelitian selama magang, serta saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi instansi dan pihak-pihak berkepentingan.

